

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tax Avoidance merupakan salah satu isu penting dalam studi perpajakan dan ekonomi yang berhubungan langsung dengan keberlanjutan fiskal suatu negara. Pham, Nguyen, dan Nguyen (2024) dalam studi "*The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Listed Firms in Vietnam*" menyebutkan bahwa *governance* perusahaan yang kuat berperan penting dalam mengendalikan praktik *tax avoidance*. Mereka menegaskan bahwa *tax avoidance* tidak selalu berdampak negatif, terutama bila dilakukan secara transparan dan dalam batas legal, tetapi praktik yang agresif dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial. *Tax avoidance* sering kali terjadi akibat ketidaksesuaian antara kewajiban pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan dengan jumlah pajak yang sebenarnya dibayarkan. Meskipun terdapat perbedaan antara *tax avoidance* yang sah dan pengelakan pajak ilegal, kedua praktik tersebut dapat merugikan perekonomian negara, mengurangi pendapatan negara, dan memperburuk ketimpangan sosial. Perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* sebagai respons terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi strategi fiskal mereka. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi makroekonomi, kebijakan pemerintah, serta karakteristik spesifik perusahaan itu sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno et al. (2024) *tax avoidance* di Indonesia masih menjadi masalah yang signifikan. Penelitian mereka mengenai karakteristik perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa eksekutif perusahaan

dan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan *tax avoidance* yang mereka lakukan. Hal ini sangat berkaitan dengan hubungan politik yang juga menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan pajak yang mereka pilih. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti yang dialami Indonesia pada tahun-tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, perusahaan lebih cenderung untuk mencari celah hukum guna mengurangi kewajiban pajak mereka, yang justru berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi.

Terdapat beberapa variabel yang berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan untuk menghindari pajak. Inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran adalah tiga faktor utama yang kerap dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Masing-masing variabel ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja ekonomi perusahaan dan perilaku perpajakannya, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti yang terjadi selama periode 2021 hingga 2024. Kurniawan (2020) dalam penelitiannya mengenai pengaruh faktor makroekonomi terhadap perilaku perpajakan perusahaan Indonesia, menyatakan bahwa fluktuasi inflasi dan suku bunga dalam periode tertentu dapat mempengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam pengelolaan pajak.

Sulastri., & Suselo, D. (2022) berpendapat bahwa inflasi memiliki dampak besar terhadap sektor industri dan perdagangan, terutama ketika harga bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi meningkat. Mereka menyatakan bahwa lonjakan harga yang disebabkan oleh inflasi akan mengurangi margin keuntungan perusahaan dan meningkatkan biaya produksi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi daya saing perusahaan dalam pasar domestik dan internasional. Inflasi merupakan indikator penting yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian. Ketika tingkat inflasi tinggi,

perusahaan mungkin merasa perlu untuk menyesuaikan struktur biaya dan keuntungan agar tetap dapat bertahan di pasar. Dalam upaya mempertahankan profitabilitas, beberapa perusahaan dapat tergerak untuk menghindari pajak dengan cara-cara yang tidak selalu sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. *tax avoidance* dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan, merubah struktur biaya, atau bahkan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Fenomena ini akan lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki fleksibilitas dalam hal perencanaan pajak dan yang beroperasi di sektor-sektor yang lebih sensitif terhadap inflasi.

Menurut Maechler (2024), suku bunga juga berperan penting dalam membentuk strategi ekonomi yang dipilih oleh perusahaan. Dalam situasi suku bunga yang tinggi, biaya modal untuk perusahaan akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi laba bersih yang harus dikenakan pajak. Saat perusahaan mengalami kenaikan biaya pinjaman, mereka cenderung mencari metode untuk mengecilkan beban pajak, baik dengan menunda kewajiban tersebut atau dengan menerapkan strategi perencanaan pajak yang lebih intensif. Suku bunga yang tinggi ini juga dapat memengaruhi keputusan investasi dan ekspansi perusahaan, yang mungkin memperbesar insentif untuk melakukan *tax avoidance* melalui teknik-teknik seperti transfer pricing atau pengalihan laba.

Maechler (2024) dalam artikel "*Monetary policy in an era of supply headwinds – do the old principles still stand?*" menyatakan bahwa perusahaan yang menghadapi suku bunga tinggi akan cenderung mengurangi ekspansi dan fokus pada pengelolaan utang mereka, terutama untuk perusahaan yang sangat bergantung pada pinjaman. Hal ini dapat berimplikasi pada kebijakan fiskal dan *tax avoidance* yang lebih agresif, karena perusahaan berusaha mengurangi kewajiban finansial.

Autor & Deming (2023) dalam studi mereka "*A Young Person's Guide to Lawrence F. Katz*" menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi memiliki dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi pasca krisis. Mereka berpendapat bahwa pengangguran yang berkepanjangan dapat menghambat permintaan agregat karena menurunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian pasar kerja. Tingkat pengangguran juga merupakan variabel penting dalam perekonomian yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam hal *tax avoidance*. Ketika tingkat pengangguran tinggi, ekonomi cenderung melambat, dan daya beli masyarakat berkurang. Dalam situasi seperti ini, perusahaan mungkin menghadapi penurunan permintaan untuk produk dan jasa mereka. Penurunan pendapatan ini dapat memotivasi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui *tax avoidance*, guna mempertahankan kestabilan finansial mereka. Di sisi lain, dalam periode dengan tingkat pengangguran yang rendah, ekonomi biasanya lebih stabil dan permintaan pasar lebih tinggi, sehingga perusahaan mungkin lebih fokus pada ekspansi dan pertumbuhan daripada mengurangi beban pajak. Namun, pada saat yang sama, persaingan yang meningkat di pasar juga dapat memicu perusahaan untuk mengeksplorasi berbagai cara dalam merencanakan pajak secara lebih strategis.

Periode 2021-2024 di Indonesia merupakan periode yang penuh tantangan, yang diawali dengan adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi. Pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan untuk mendukung perusahaan, seperti pemberian insentif fiskal dan pengurangan tarif pajak untuk beberapa sektor. Namun, meskipun ada upaya untuk merangsang perekonomian, ketidakpastian global dan domestik menyebabkan

banyak perusahaan harus beradaptasi dengan cepat. Situasi ini menimbulkan tekanan keuangan yang dapat mendorong sejumlah perusahaan untuk mencari celah dalam sistem pajak. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang bersifat stimulatif juga mungkin dapat mengurangi insentif untuk *tax avoidance*, karena perusahaan diberikan kelonggaran dalam hal kewajiban pajak.

Selain itu, data yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran memengaruhi perilaku pajak perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di BEI umumnya memiliki akses lebih besar terhadap informasi finansial dan sumber daya yang dapat digunakan untuk merencanakan pajak mereka. Oleh karena itu, analisis terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana *tax avoidance* dilakukan di tingkat korporasi, terutama dalam konteks dinamika ekonomi yang terus berubah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2021 hingga 2024. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi perilaku *tax avoidance*, serta implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi *tax avoidance* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam merancang strategi perpajakan yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dikemukakan pada penelitian ini diantaranya :

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?
2. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?
3. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk menganalisis pengaruh dari inflasi terhadap *tax avoidance* perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari suku bunga terhadap *tax avoidance* perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari tingkat pengangguran terhadap *tax avoidance* perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai hubungan antara faktor ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran dengan *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai bagaimana inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran saling berinteraksi dan mempengaruhi keputusan *tax avoidance* pada perusahaan di pasar saham Indonesia.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan bidang faktor ekonomi makro, khususnya inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi sehingga akan menstimulasi penelitian-penelitian sejenis dengan pengolahan data terbaru.

4. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan untuk memahami faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan perpajakan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat merumuskan strategi perpajakan yang lebih tepat dan efisien, serta menghindari potensi risiko hukum terkait dengan *tax avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang disusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan mengenai pengaruh inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terhadap *tax avoidance* perusahaan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang terdapat dalam penelitian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi variabel penelitian, sampel dalam penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis dan pengujian hipotesis.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil penelitian.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan keterbatasan serta saran penelitian mengenai pengaruh inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran terhadap *tax avoidance* perusahaan.